



# POLICY ✨ BRIEF ✨



# Makassar Creative Hub

Gerbang Baru  
Keunggulan Inklusif

**Tim Peneliti :**

Muhammad Idris DP  
Erni Cahyani Ibrahim  
Alam Tauhid Syukur  
Wahyu Nurdiansyah Nurdin  
Arif Alauddin Umar

Kerjasama  
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar  
dengan Politeknik STIA LAN Makassar

# Executive Summary



Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui transformasi sosial-ekonomi khususnya ekonomi kreatif, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengusung program Makassar *Creative Hub* (MCH). Namun, Kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia merupakan beberapa aspek yang menjadi permasalahan sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, membangun *creative hub* yang sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan potensi di setiap kecamatan, juga merupakan polemik tersendiri.

Jika *creative hub* yang dibangun nantinya tidak sesuai dengan hal tersebut, maka sumber daya besar yang diinvestasikan (infrastruktur, SDM, anggaran, dan sebagainya) akan sia-sia. Oleh karena itu, Pemkot Makassar perlu mempertimbangkan membangun MCH secara *grouping*, dalam artian satu pusat kreatif untuk beberapa kecamatan berdasarkan skema kolaborasi atau kategorisasi, sehingga publik tidak perlu menunggu sampai akhir periode pemerintahan untuk menikmatinya.

Selain itu, Pemkot Makassar perlu melakukan sinkronisasi kebijakan/program melalui kolaborasi OPD terkait (Dinas Pariwisata dan Ekraf, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas PU, Brides, Dinas Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Pertanian, DLH, DP3A, Dinas Perdagangan, dan sebagainya yang dapat memberikan dukungan teknis sesuai kebutuhan MCH, sehingga MCH dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan.



# Pendahuluan

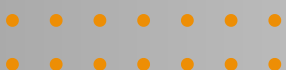
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah secara inheren mengusung visi, yakni “Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan”, yang diturunkan ke dalam 7 misi, diantaranya meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Makassar *Creative Hub* (MCH) merupakan salah satu program strategis utama, yang bertujuan menciptakan ekosistem kreatif di Kota Makassar, yang menjadi bagian upaya pemkot dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.



Program ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan/ SDM. Program ini diproyeksikan dapat menekan angka pengangguran sekaligus kemiskinan melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, dengan memberikan pelatihan berbasis kebutuhan industri, sehingga masyarakat tidak hanya dibekali keahlian, tetapi juga diberikan peluang untuk bekerja di sektor formal, membuka usaha atau bahkan berkarir di luar negeri.

Program ini menekankan pada pengembangan *skill* untuk kebutuhan pasar kerja/industri, sehingga Pemkot tidak sekedar memfasilitasi *creative hub* dalam perspektif ruang aktivitas kreatif, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan kapasitas/kompetensi atau keterampilan. MCH diharapkan hadir bukan hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi sebagai ekosistem kreatif yang menjembatani anak muda, komunitas, pelaku usaha, pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat umum.

Mewujudkan program MCH di 15 kecamatan/wilayah merupakan suatu tantangan tersendiri, mengingat setiap kecamatan memiliki potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda. Tantangan lainnya datang dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan MCH. Karenanya, diperlukan suatu sinkronisasi kebijakan pembangunan *creative hub* dalam lingkup Kota Makassar, sehingga setiap institusi, baik pemerintahan, swasta, maupun kemasyarakatan dapat berkontribusi dan bahkan berkolaborasi dalam arah dan spirit yang sama guna membangun dan mengembangkan *creative hub*.



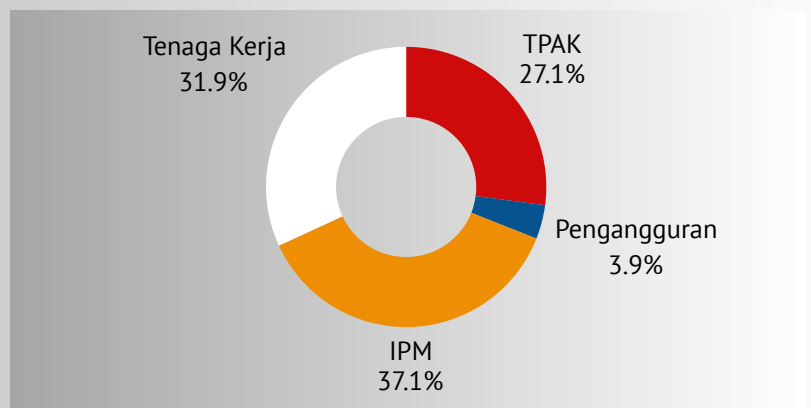


# Deskripsi Masalah

## Potensi SDM Usia Produktif Tinggi, tapi Minim Pengembangan Skill

Kota Makassar memiliki potensi SDM usia produktif yang tinggi, mulai dari kelompok/komunitas anak muda, kelompok UMKM, pelaku industri pariwisata dan ekraf, serta kelompok rentan dan disabilitas. Potensi ini belum dibarengi dengan edukasi yang menggali kreativitas, aktivitas peningkatan skill/keterampilan teknis, termasuk minimnya wadah penyaluran ide/kreativitas.

Secara statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 62,04% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,71% pada tahun 2024, indeks pembangunan manusia (IPM) pada angka 85,23 yang masih tertinggal dari daerah lain di tahun 2024, mayoritas tenaga kerja (73,16%) berada pada jenjang pendidikan menengah ke bawah pada tahun 2024, dan 3.925 anak putus sekolah dan tidak sekolah pada tahun 2023. Belum lagi dengan fakta minimnya lembaga keterampilan (*skill course*) eksternal yang dapat mewadahi pengembangan kompetensi masyarakat.



Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam dimensi sosial kemasyarakatan di Kota Makassar bukan terletak pada minimnya lapangan kerja, melainkan pada kualitas SDM dalam perspektif ketenagakerjaan.

## Ada Potensi Produk Industri Pariwisata dan Ekraf, tetapi belum terpasarkan dengan baik, sehingga belum mampu meningkatkan taraf perekonomian

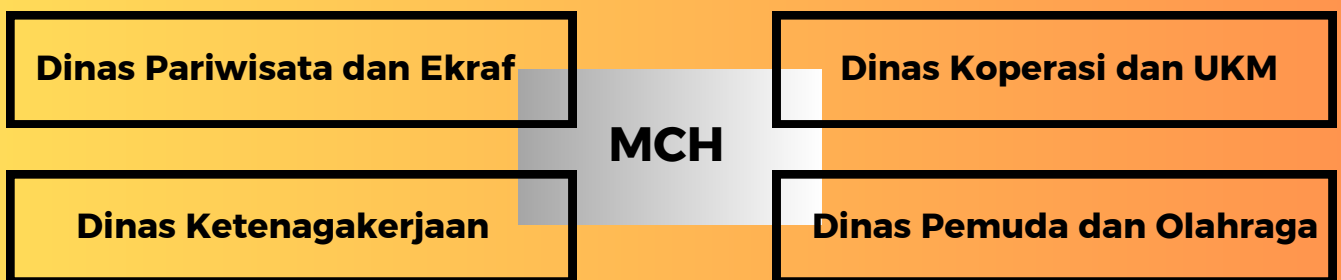
Kota Makassar memiliki potensi ekonomi kreatif yang tinggi. Secara statistik, terdapat 37.375 pelaku industri kreatif di berbagai sektor, yang subsektor terbesarnya adalah kuliner dengan 24.490 usaha kreatif, fashion 7.952, kriya 3.189, penerbitan 849, dan fotografi dengan 287 usaha kreatif. Namun, potensi yang ada belum mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, yang dapat dilihat dari persentase penduduk miskin Kota Makassar yang masih berada pada angka 4,97% pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan keterbatasan dalam hal pemasaran, baik melalui strategi konvensional maupun *marketplace*. Banyak industri UMKM di Kota Makassar terkendala memasukkan produknya ke ritel modern. Bahkan, banyak pelaku UMKM yang kebingungan mengakses pasar, sehingga sekalipun setiap kecamatan memiliki produk industri yang dihasilkan, namun hanya mampu dipasarkan secara lokal.



MCH awalnya diproyeksikan hanya akan melibatkan 4 OPD terkait, mulai dari Dinas Pariwisata dan Ekraf, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Hanya untuk 4 OPD ini saja, Pemkot Makassar harus mampu mengatasi hambatan sektoral di setiap bidang. Bahkan, dari setiap permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang teridentifikasi di setiap kecamatan di Kota Makassar, ternyata dibutuhkan dukungan dari berbagai OPD lainnya, sehingga hambatan sektoral yang harus dihadapi kian bertambah. Belum lagi dengan fakta bahwa masih banyak stakeholder di tingkat kecamatan (pemerintah kecamatan, kelurahan, masyarakat, industri, dll) yang belum memiliki pemahaman mendasar terkait MCH dan tidak tahu bagaimana mengaksesnya

## Hambatan Sektoral dan Kebutuhan Mendesak Atas Makassar Creative Hub

### Proyeksi awal MCH melibatkan 4 OPD



MCH berdasarkan perencanaan akan dibangun di 15 kecamatan secara bertahap hingga 2028. Namun, ternyata publik di Kota Makassar memiliki kebutuhan mendesak agar MCH segera direalisasikan. Bahkan, untuk membangun 1 pusat MCH di satu kecamatan tentu dibutuhkan anggaran, SDM, dan sarana/prasarana pendukung, sehingga sulit untuk merealisasikan MCH di seluruh kecamatan dalam waktu dekat. Padahal setiap kecamatan memiliki kebutuhan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya yang sangat penting dan mendesak untuk difasilitasi secepatnya.



# Rekomendasi

## Peningkatan Kapasitas SDM Berbasis Potensi Lokal



Edukasi/pengembangan *skill* yang difasilitasi MCH perlu melibatkan pelaku industri kreatif dan akademisi sebagai mentor reguler, sehingga muatan kompetensi yang diberikan sesuai kebutuhan industri dan penyerapan tenaga kerja. MCH juga perlu berkolaborasi dengan lembaga keterampilan (*skill course*) eksternal yang dapat memwadahi pengembangan kompetensi, seperti BBPVP Makassar dan lembaga sertifikasi untuk pelatihan berbasis kompetensi lainnya. Selain itu, setiap MCH sebaiknya memiliki kurikulum pelatihan yang berbeda sesuai potensi dan kebutuhan lokal, seperti kelautan/perikanan di Kepulauan Sangkarrang, kewirausahaan kuliner dan kreatif di Wajo, digital kreatif di kecamatan perkotaan padat penduduk, dan sebagainya.

## Penguatan Ekosistem Bisnis Kreatif

Pemkot Makassar perlu membangun suatu ekosistem yang dapat memberikan jaminan produk industri terserap pasar. Pemkot perlu memfasilitasi akses pelaku UMKM ke ritel modern dan *marketplace* digital. Pemkot juga perlu memfasilitasi *booth display*, *market forum*, dan inkubasi usaha secara internal serta secara rutin mengadakan festival, *showcase*, *demo day*, dan *event* rutin lainnya sebagai ruang promosi dan jejaring eksternal, yang kesemuanya ini dapat diwadahi MCH, sehingga produk ekonomi kreatif yang sudah ada dapat memberikan nilai tambah termasuk nilai ekonomi bagi publik. Pemkot Makassar juga perlu memberikan insentif bagi *startup* atau industri kreatif yang berkembang melalui MCH, sehingga komunitas kreatif akan terus termotivasi dalam berkreasi dan berinovasi.

## Sinkronisasi Kebijakan Melalui Kolaborasi Stakeholder

Pemkot Makassar perlu menyusun dokumen kebijakan bersama sebagai payung integrasi (misalnya Perwali tentang tata kelola/penyelenggaraan MCH), sehingga implementasi MCH lebih memiliki dasar yang kuat dan lebih mengikat setiap stakeholder. Pemkot juga perlu membentuk forum koordinasi lintas OPD yang rutin menyelaraskan program, anggaran, dan peran instansi dalam MCH. Terlebih, banyak OPD yang perlu dilibatkan (Dinas PU yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur MCH, Breda selaku penanggungjawab kajian dan riset pengembangan MCH, serta Dinas Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan, dan sebagainya yang dapat memberikan dukungan teknis sesuai kebutuhan MCH), disamping OPD utama (Dinas pariwisata dan Ekraf selaku leading stakeholder, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan) yang sejak awal dilibatkan dalam perencanaan pembangunan MCH. Selain itu, Pemkot Makassar juga perlu mengaktifkan komunitas kreatif di tingkat kecamatan sebagai mitra operasional, sehingga sosialisasi terkait MCH dan kinerja kolaborasi stakeholder dapat lebih efektif.

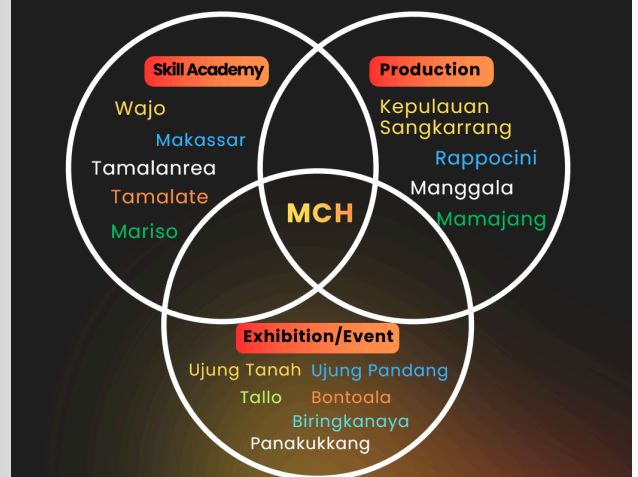


## Pendekatan Pembangunan MCH Berbasis Kebutuhan Kecamatan

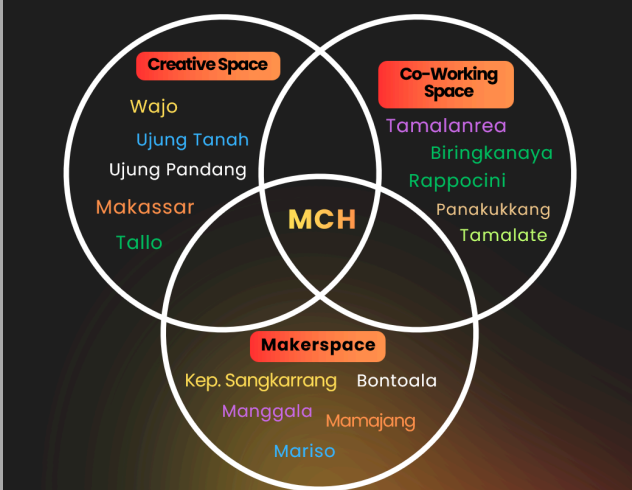
Pemkot Makassar perlu membangun MCH berbasikan kebutuhan kelompok sasaran di setiap kecamatan, seperti memberikan jaminan akses bagi kelompok rentan dan disabilitas, serta mengatasi permasalahan mendasar yang dapat mempengaruhi kinerja MCH, seperti akses listrik, internet, dan transportasi perairan di wilayah kepulauan. Selain itu, membangun MCH di setiap kecamatan tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai, SDM yang kompeten, dan anggaran yang besar, terlebih kebutuhannya sangat urgen dan signifikan untuk segera direalisasikan dalam waktu dekat. Karenanya, agar pembangunan MCH benar-benar sesuai dengan kebutuhan kecamatan/kelompok sasaran, terdapat beberapa alternatif pembangunan MCH.

**Pertama**, pembangunan MCH berbasis skema kolaborasi. Setiap kecamatan memiliki kebutuhan yang relatif sama terkait *academy skill*, *production*, dan *exhibition/event*, namun dengan prioritas yang berbeda, sehingga terdapat kemungkinan membangun satu pusat MCH untuk beberapa kecamatan/wilayah (*grouping*). Jika ini dilakukan, Pemkot tidak perlu membangun MCH di setiap kecamatan, melainkan membangun satu pusat MCH dengan fasilitas lengkap yang dapat mewadahi kebutuhan beberapa kecamatan dengan prioritas yang relatif sama. Hal ini sangat bermanfaat dari aspek efisiensi infrastruktur, SDM, dan anggaran, sehingga Pemkot dapat menghadirkan MCH sebagai pusat kreativitas publik Kota Makassar dalam waktu dekat, serta dapat dinikmati di seluruh wilayah tanpa harus menunggu akhir periode pemerintahan saat ini

### MAPPING CREATIVE HUB ACTIVITY (Skema Kolaborasi)



### MAPPING CREATIVE HUB ACTIVITY (Kategorisasi)



**Kedua**, pembangunan MCH berbasis kategorisasi. Setiap kecamatan memiliki kebutuhan yang relatif sama terkait aspek *creative space*, *co-working space*, dan *makerspace*. Namun, prioritas setiap kecamatan akan ketiga hal ini juga berbeda, sehingga terdapat pula kemungkinan untuk membangun MCH secara *grouping* berdasarkan kategorisasi.



# Referensi

Bappeda Kota Makassar. 2025. RPJMD Kota Makassar 2025-2029. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

Bappenas. 2025. Relayout Narasi RPJMN 2025-2029. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Beranda - RPJPN 2025-2045. 2025. Retrieved March 26, 2025, from <https://indonesia2045.go.id/>

Boswinkel, K., dan van Meerkerk, E. 2023. Creative hubs: an anomaly in cultural policy? *International Journal of Cultural Policy*, 29(6), 767–785. <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2107636>.

BPS Kota Makassar. 2025. Kecamatan Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

BPS Kota Makassar. 2025. Kota Makassar Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Chaloupková, M., Kunc, J., & Koutský, J. 2023. Creative Economy: Support of Creative Hubs by the Public Sector in the Urban Environment. *Technological and Economic Development of Economy*, 29(6), 1611–1632. <https://doi.org/10.3846/tede.2023.20136>.

Flego, C., dan Tei, A. 2024. Creative and cultural hub sustainability: from theory to practice. *International Journal of Cultural Policy*. <https://doi.org/10.1080/10286632.2024.2372332>.

Khoo, S. L., Lim, Y. M., dan Badarulzaman, N. 2024. Reconceptualising creative hubs in Malaysia: Needs and voices from creative hub users. *City, Culture and Society*, 37. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2024.100583>.

Labbe, D., Zuberec, C., & Turner, S. 2022. Creative hubs in Hanoi, Vietnam: Transgressive spaces in a socialist state? *Urban Studies*, 59(15), 3184–3200. <https://doi.org/10.1177/00420980221086371>

Pratt, A. C. 2021. Creative hubs: A critical evaluation. *City, Culture and Society*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2021.100384>.

Sabeq, Mohammed. 2025. Rancangan Implementasi Makassar Creative Hub. Pemerintah Kota Makassar.

UN-Habitat. 2020. *Cities and Culture: Harnessing Culture for Sustainable Urban Development*. United Nations Human Settlements Programme.

